



Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap PDRB Dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Danny Febrian Natasuanda ¹, I Wayan Wenagama ²

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Bali

Received: 17 Desember 2023	Abstract
Revised: 27 Desember 2023	<i>Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja terhadap PDRB kabupaten/kota Provinsi Bali, menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Bali, dan menganalisis tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui PDRB kabupaten/kota Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 90 jumlah pengamatan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dan tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui PDRB sebagai variabel intervening atau mediasi.</i>
Accepted: 01 Januari 2024	Keywords: <i>Tingkat Pendidikan, Jumlah Tenaga Kerja, PDRB, Tingkat Kemiskinan</i>

(*) Corresponding Author: dannynatasuanda24@gmail.com

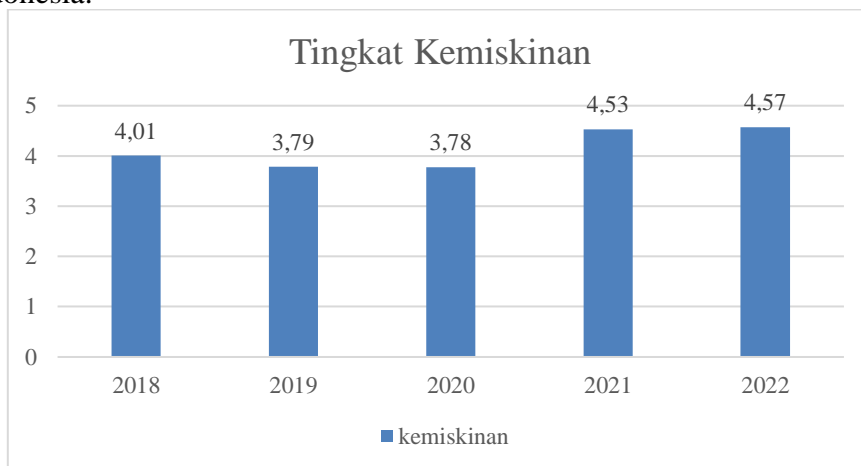
How to Cite: Natasuanda, D. F., & Wenagama, I. W. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap PDRB Dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466134>

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah suatu upaya dalam mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Tujuan tersebut sejalan dengan banyaknya kegiatan pembangunan yang mulai diarahkan untuk pembangunan daerah, terutama daerah yang angka kemiskinannya relative meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu, penurunan laju pertumbuhan penduduk miskin merupakan suatu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan nasional (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003). Permasalahan mengenai kemiskinan adalah suatu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini di berbagai negara terutama pada negara yang masih berkembang. Fenomena kemiskinan diakibatkan oleh ketidakmampuan sekelompok masyarakat dalam mencapai taraf manusiawi dalam penyelenggaraan hidup. Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar makan maupun kebutuhan dasar bukan makanan dalam pengukuran sisi pengeluaran merupakan anggapan mengenai kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi dimana kebutuhan mendasar seseorang tidak mampu terpenuhi seperti, tempat tinggal, pakaian, makanan dan juga obat-obatan (Hardinandar, 2019). Terjadinya kesenjangan yang ada di antara Masyarakat kaya dan masyarakat miskin yang meluas disebabkan karena adanya disparitas yang tinggi antar daerah, hal tersebut karena terdapat distribusi pendapatan yang kurang merata yang menjadikan salah satu akar permasalahan adanya kemiskinan di suatu wilayah (Sianturi, 2011). Permasalahan kemiskinan akan menyebabkan

penurunannya kualitas dari sumber daya manusia sendiri sehingga produktivitas seseorang rendah dan akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diperoleh. Faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia yaitu karena rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, dan masih banyak yang lainnya, sehingga pentingnya peningkatan tingkat pendidikan di suatu wilayah sangat perlu diperhatikan untuk dapat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Provinsi Bali merupakan satu dari banyaknya provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan terendah dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia.

Pada tahun 2017 hingga 2019 Provinsi Bali selalu menduduki posisi dengan persentase kemiskinan terendah kedua di Indonesia bersanding dengan DKI Jakarta diposisi pertama. Pada awal tahun 2020 terjadi fenomena yang cukup menggemparkan yaitu merabahnya virus covid-19 yang muncul di Indonesia. Pada awal mula kemunculan virus covid-19 pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat dengan jangka waktu yang cukup lama, sehingga ini mengakibatkan banyak masyarakat yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Terjadinya pemutusan hubungan kerja yang secara masal ini diakibatkan karena perputaran ekonomi di Indonesia yang terhambat dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kemunculan pandemic tersebut memberikan dampak yang cukup buruk bagi Indonesia, yang mana Indonesia sendiri sedang berjuang dalam pengurangan penduduk miskin, namun ketika pandemi ini terjadi persentase angka penduduk miskin yang ada di Indonesia mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 dan 2021. Cukup banyak provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan persentase penduduk miskin, namun tidak dengan Provinsi Bali, Provinsi Bali justru menjadi salah satu provinsi yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin. Pada tahun 2020 Provinsi Bali justru menempati posisi terakhir dalam persentase penduduk miskin diantara provinsi lain yang ada di Indonesia.

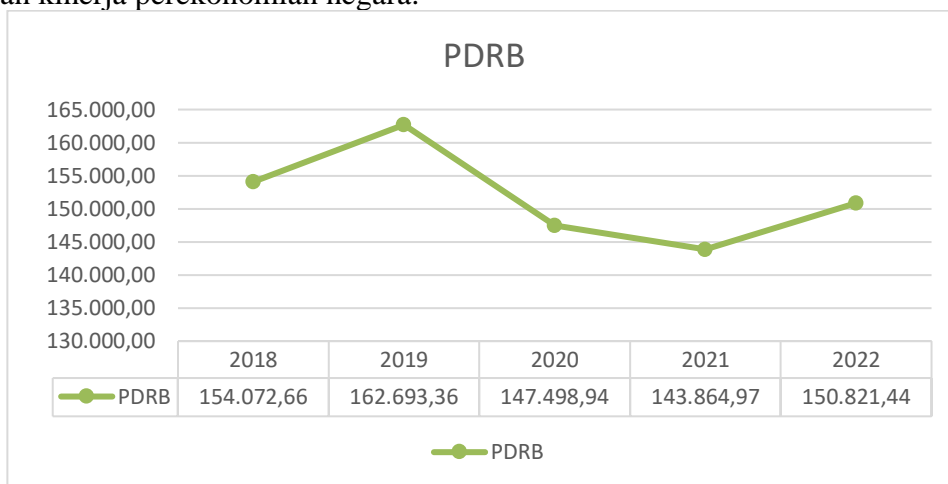


Gambar 1 menyatakan bahwa selama tahun 2018-2020 Provinsi Bali selalu berhasil menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat, yang mana pada masa disaat pandemi covid-19 terjadi tahun 2020 di Indonesia, justru Provinsi Bali masih berhasil menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Namun pada tahun 2021 dan 2022 tingkat kemiskinan di Provinsi Bali mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan 5 tahun terakhir. Pada data tersebut juga menyatakan bahwa kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Bali selalu ditempatkan oleh Kabupaten Badung dan disusul oleh Kota Denpasar, yang mana disini terlihat bahwa terdapat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selama 5 tahun terakhir Kabupaten Badung dan

Kota Denpasar tidak pernah menyentuh angka 3 persen dalam tingkat penduduk miskin, sedangkan pada kabupaten lain tingkat kemiskinannya selalu menyentuh diatas 4 persen dalam 5 tahun terakhir.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pendapatan yang dihasilkan melalui barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada pada suatu daerah dalam periode tertentu, semakin tingginya tingkat PDRB suatu wilayah, maka semakin besar pula tingkat penerimaan wilayah tersebut, sehingga semakin tingginya tingkat PDRB dapat menjadi gambaran umum dari tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dari itu laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan PDRB tanpa memperhatikan apakah peningkatan itu lebih besar atau kecil (Sukirno, 2011).

Penggerak utama dalam penurunan dan peningkatan angka kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi (Fosu, 2010). Menurut Kuznet (dalam Tulus Tambunan, 2001) menyatakan bahwa, adanya korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, karena tingkat kemiskinan akan cenderung meningkat saat tahap awal proses pembangunan, namun tingkat kemiskinan akan berangsur menurun apabila mendekati tahapan akhir dari proses pembangunan. Siregar (2006) berpendapat bahwa dalam pengurangan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary condition*), dan keefektifan pertumbuhan ekonomi dalam pengurangan angka kemiskinan adalah syarat kecukupan (*sufficient condition*) sehingga pertumbuhan ekonomi sendiri dapat menjadi indikator yang cukup penting dalam penilaian kinerja perekonomian negara.



Gambar 2 menyatakan bahwa PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sepanjang tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan yang cukup baik, namun pada tahun 2020 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali serentak mengalami penurunan. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2022 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan namun sudah terlihat bahwa di Provinsi Bali sudah mengalami pemulihan.

Dari kedua data tersebut dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan dengan teori mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, khususnya setelah fenomena covid-19 sendiri. Dimulai pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB di Provinsi Bali selalu mengalami penurunan terutama pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mengalami keterpurukan pada masa covid-19, dalam teori yang ada mengenai pertumbuhan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat seharusnya dapat mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan yang ada, sedangkan di Provinsi Bali

khususnya pada masa pandemi covid-19 disaat tingkat PDRB di Provinsi Bali mengalami keterpurukan yang cukup mendalam justru tingkat kemiskinan pada Provinsi Bali mengarah positif dan pada tahun 2022 saat angka PDRB di Provinsi Bali mengalami peningkatan justru angka kemiskinan di Provinsi Bali ikut mengalami peningkatan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan endogen (endogeneous growth theory) menjelaskan bahwa pentingnya investasi dalam modal fisik maupun modal manusia dapat menentukan kondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Adanya peningkatan pada pendidikan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas masyarakatnya. Untuk memenuhi harapan individu, tujuan dari pendidikan sendiri untuk dapat menumbuhkan dan meningkatkan kualitas masyarakat tersebut (Fauzi, 2018). Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi keadaan seseorang dalam memiliki akses dan kesempatan kerja yang lebih besar dibandingkan oleh seseorang dengan pendidikan yang lebih rendah, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan masyarakatnya, dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan suatu negara, ini dikarenakan semakin tingginya tingkat pendidikan maka akan berpengaruh terhadap semakin tingginya tenaga kerja yang akan terserap. Tingginya tingkat pendidikan tenaga kerja juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas seseorang, sehingga akan memiliki pengaruh terhadap semakin meningkatnya tingkat PDRB dan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Nugroho, 2016).

Selain Pendidikan, tingkat tenaga kerja juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tingginya angka masyarakat yang bekerja maka dapat mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan yang ada, ini dikarenakan dengan meningkatnya penduduk yang bekerja maka semakin meningkat jumlah masyarakat yang memiliki pendapatan, dan secara ekonomi penduduk yang bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup maka akan digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian ini bersifat menyatakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Bali yang terbagi dari sembilan kabupaten/kota didalamnya. Objek penelitian ini adalah mencari pengaruh tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja terhadap PDRB dan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu data gabungan antara data *time series* tahun 2013-2022 (10 tahun) dan *cross section* sebanyak 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali, sehingga total keseluruhan data dari penelitian ini yaitu sebanyak 90 pengamatan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi non-partisipan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam mengestimasi parameter model regresi data panel yaitu menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) kemudian dalam memilih model estimasi regresi data panel yang terbaik digunakan beberapa pengujian yaitu, Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier*. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan yaitu analisis jalur (*Path Analysis*). Teknik analisis jalur adalah teknik analisis statistik yang digunakan dalam pengujian kekuatan

komparatif hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Serangkaian parameter diestimasi dengan memecahkan satu atau lebih persamaan struktural untuk menguji kecocokan korelasi antara dua model kasual atau lebih, yang dihipotesiskan agar sesuai dengan data (Christy Lleras, 2005). Persamaan regresi analisis jalur yang digunakan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Model struktural 1: } Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{Model struktural 2: } Y_2 = \alpha + \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

Y_1 = PDRB

Y_2 = Tingkat Kemiskinan

α = Konstanta

X_1 = Tingkat Pendidikan

X_2 = Jumlah Tenaga Kerja

β_1, β_2, \dots = Koefisien regresi masing-masing variabel

e = Error

Besarnya nilai error/kekeliruan dari e_1 dan e_2 dihitung melalui rumus:

$$e_1 = \sqrt{(1 - R1^2)} \dots\dots\dots(3)$$

$$e_2 = \sqrt{(1 - R2^2)} \dots\dots\dots(4)$$

Terdapat dua pengujian hipotesis dalam teknik analisis jalur yaitu, pengujian pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kriteria pengujian dalam pengujian pengaruh langsung yaitu apabila nilai signifikansi $< 0,05$ (nilai alpha), maka H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima. Kemudian sebaliknya apabila nilai signifikansi $> 0,05$ (nilai alpha), maka H_0 diterima sedangkan H_1 ditolak. Kriteria pengujian dalam pengujian pengaruh tidak langsung yaitu apabila $p\text{-value} \geq 0,05$ atau $Z_{hitung} \leq Z_{table}$, maka H_0 diterima. Artinya Y_1 bukan merupakan variabel intervening. Jika $p\text{-value} < 0,05$ atau $Z_{hitung} > Z_{table}$, maka H_0 ditolak berarti Y_1 merupakan variabel intervening. Perhitungan dalam pengujian pengaruh tidak langsung dapat dihitung menggunakan rumus:

$$Z = \frac{b_1 b_5}{s_{b_1 b_5}} \text{ dan } s_{b_1 b_5} = \sqrt{b_5^2 s_{b_1}^2 + b_1^2 s_{b_5}^2}$$

Keterangan:

b_1 = koefisien pengaruh variabel eksogen (X) terhadap variabel intervening (Y_1)

b_5 = koefisien pengaruh variabel intervening (Y_1) terhadap variabel endogen (Y_2)

S_{b_1} = standard error koefisien regresi variabel eksogen (X) terhadap variabel intervening (Y_1)

S_{b_5} = standard error koefisien regresi variabel intervening (Y_1) terhadap variabel endogen (Y_2)

HASIL & PEMBAHASAN

HASIL

Tabel 1.
Jalur Persamaan Regresi 1

Model	R Square	Coefficients	Sig.
		Beta	
Tingkat Pendidikan (X1)	0,63464	1388,776	0,0004
Jumlah Tenaga Kerja (X2)		0,058137	0,0000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis jalur substruktural 1, maka persamaan struktural sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1$$

$$Y_1 = 1388,776X_1 + 0,058137X_2 + e_1$$

Tabel 2.
Jalur Persamaan Regresi 2

Model	R Square	Coefficients	
		Beta	Sig.
Tingkat Pendidikan (X1)		-0,492303	0,0000
Jumlah Tenaga Kerja (X2)	0,43711	4.61E-06	0,0668
PDRB (Y1)		-8,44E-05	0,0054

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis jalur substruktural 2, maka persamaan struktural sebagai berikut:

$$Y_2 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Y_1 + e_2$$

$$Y_2 = -0,492303X_1 + 4.61E-06X_2 - 8,44E-05Y_1 + e_2$$

Berdasarkan model substruktural 1 dan substruktural 2, maka perhitungan nilai standar eror adalah sebagai berikut:

$$e_i = \sqrt{1 - Ri^2}$$

$$e_1 = \sqrt{1 - Ri^2} = \sqrt{1 - 0,634640} = 0,6044501634$$

$$e_2 = \sqrt{1 - Ri^2} = \sqrt{1 - 0,437110} = 0,7502599549$$

Berdasarkan perhitungan nilai standar eror diatas, didapatkan hasil standar eror variabel PDRB (e_1) sebesar 0,6044501634 dan standar eror variabel tingkat kemiskinan (e_2) sebesar 0,7502599549. Perhitungan koefisien determinasi total adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R^2m &= 1 - (e_1)^2 (e_2)^2 \\ &= 1 - (0,6044501634)^2 (0,7502599549)^2 \\ &= 0,7943425096 \end{aligned}$$

Nilai determinasi total diketahui sebesar 0,7943 yang memiliki arti bahwa sebesar 79,43 persen variabel tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja, dan PDRB. Sedangkan sebesar 20,57 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Tabel 3.
Hasil Coefficients Struktur 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11398,01	2870,069	-3,971336	0,0001
X1	1388,776	377,5985	3,677918	0,0004
X2	0,058137	0,007531	7,719862	0,0000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan hasil *coefficients* struktur 1, maka diperoleh hasil persamaan struktural 1 sebagai berikut:

$$Y_1 = 1388,776X_1 + 0,058137X_2 + e_1$$

Tabel 4.
Hasil Coefficients Struktur 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8,90861	0,786932	11,32068	0,0000
X1	-0,492303	0,107834	-4,565386	0,0000
X2	4.61E-06	2,48E-06	1,856295	0,0668
Y1	-8,44E-05	2,95E-05	-2,857048	0,0054

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan hasil *coefficients* struktur 2, maka dapat diperoleh hasil persamaan struktural 2 sebagai berikut:

$$Y_2 = -0,492303X_1 + 4,61E-06X_2 - 8,44E-05Y_1 + e_2$$

Pengaruh tidak langsung antara tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan yang dimediasi oleh PDRB dihitung sebagai berikut:

$$Z = \frac{\beta_1\beta_5}{s\beta_1\beta_5}$$

$$S\beta_1\beta_5 = \sqrt{\beta_5^2 S\beta_1^2 + \beta_1^2 S\beta_5^2}$$

$$= \sqrt{(-8,44E - 05)^2 (377,5985)^2 + (1388,776)^2 (2,95E - 05)^2}$$

$$= 0,0257448441$$

$$Z = \frac{0,1172126944}{0,0257448441}$$

$$Z = 4,5528$$

Oleh karena $|Z_{hitung}|$ sebesar $4,5528 > 1,960$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak yang artinya PDRB (Y_1) merupakan variabel intervening atau mediasi antara tingkat pendidikan (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengaruh tidak langsung antara PDRB terhadap tingkat kemiskinan yang dimediasi oleh PDRB dihitung sebagai berikut:

$$Z = \frac{\beta_2\beta_5}{s\beta_2\beta_5}$$

$$S\beta_2\beta_5 = \sqrt{\beta_5^2 S\beta_2^2 + \beta_2^2 S\beta_5^2}$$

$$= \sqrt{(-8,44E - 05)^2 (0,007531)^2 + (0,058137)^2 (2,95E - 05)^2}$$

$$= 0,0000015929$$

$$Z = \frac{0,0000049068}{0,0000015929}$$

$$Z = 3,0804$$

Oleh karena $|Z_{hitung}|$ sebesar $3,0804 > 1,960$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak yang artinya PDRB (Y_1) merupakan variabel intervening atau mediasi antara jumlah tenaga kerja (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dalam pengujian menghasilkan nilai koefisien beta tingkat pendidikan terhadap PDRB bernilai positif sebesar 1388,776 dan mendapatkan nilai signifikansi yaitu $(0,0004) < 0,05$ yang berarti H_1 diterima. hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah terbukti. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth theory*) yang dikemukakan oleh Paul Romer (1986) dan Robert Lucas (1988), dan Grossman-Helpman (1991) yang menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik maupun modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan

ekonomi jangka panjang. Hasil penelitian ini pun sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handrian & Indrajaya (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan secara parsial memiliki positif serta signifikan terhadap pertumbuhan PDRB/ekonomi. Demikian maka dengan membaiknya mutu sumber daya manusia, maka dapat memberikan dorongan produktivitas terhadap pribadi seseorang sehingga berpengaruh terhadap peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menyatakan bahwa semakin banyaknya masyarakat di suatu wilayah yang mampu mengenyam pendidikan formal yang semakin tinggi maupun melalui pelatihan, maka akan berpengaruh terhadap kualitas seseorang yang mana dengan kualitas SDM yang baik maka SDM wilayah tersebut mampu bersaing dengan SDM wilayah lain, selain itu dengan tingkat kualitas SDM yang baik maka dapat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas yang baik sehingga dengan banyaknya kuantitas SDM yang memiliki kualitas yang baik mampu berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan dapat meningkatkan angka PDRB di wilayah tersebut.

Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta jumlah tenaga kerja terhadap PDRB bernilai positif yaitu sebesar 0,058137 dan mendapatkan nilai signifikansi yaitu $(0,0000) < 0,05$ yang berarti H_1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah terbukti. Hasil ini sesuai dengan teori ekonomi yaitu Hukum Okun (*Okun's Law*) yang dikemukakan Arthur Okun (1962) melalui pengamatannya menyatakan bahwa banyaknya jumlah tenaga kerja biasanya diperlukan dalam menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Hasil yang sejalan juga dilakukan oleh Maisaroh dan Risyanto (2018) yang menunjukkan hasil bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Hal ini terjadi karena adanya penyerapan tenaga kerja yang baik melalui lapangan pekerjaan yang tersedia meskipun penyerapan tenaga kerja yang terjadi belum terserap secara menyeluruh. Namun perlu di perhatikan, tingginya tingkat tenaga kerja namun tidak seimbang dengan dengan kualitas sumber daya manusianya yang baik, serta adanya ketersediaan lapangan kerja yang mumpuni maka akan berpengaruh buruk terhadap tingkat PDRB suatu wilayah karena akan dipenuhi oleh tingginya tingkat pengangguran suatu daerah.

Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan bernilai negatif yaitu -0,492303 dan mendapatkan nilai signifikansi yaitu $(0,0000) < 0,05$ sehingga H_1 diterima. Hal tersebut menyatakan hipotesis tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah terbukti. Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dejanvry dan Sadoulet dalam Kokila (2000) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat mengurangi adanya ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, dengan individu yang memiliki pendidikan yang tinggi akan menciptakan kualifikasi yang diperlukan oleh pasar, maka antar individu akan memiliki persaingan yang seimbang di pasar tenaga kerja sehingga semakin banyak masyarakat yang mampu mendapatkan pekerjaan yang stabil dan mampu memiliki manfaat secara ekonomi. Hasil yang sejalan juga dilakukan oleh Wisnawa & Widanta (2022) yang menunjukkan hasil bahwa pendidikan dalam angka partisipasi sekolah memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan yang dicapai oleh individu tidak dipungkiri akan memiliki dampak yang cukup buruk yaitu dapat terjadi kesulitan dalam mendapat suatu pekerjaan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang dimiliki. Namun apabila Masyarakat mendapatkan Pendidikan yang tinggi maka setidaknya mampu

memudahkan individu tersebut mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan individu tersebut kemudian akan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang menurun di wilayah tersebut. Pendidikan sendiri adalah suatu investasi dari modal peningkatan kualitas manusia, investasi pendidikan memiliki peranan penting dalam menggapai kesuksesan perekonomian jangka panjang suatu wilayah. Semakin tinggi investasi bidang pendidikan maka mampu menjadi penopang kemakmuran masyarakat.

Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta jumlah tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan bernilai positif sebesar $4,61E-06$ dan mendapatkan nilai signifikansi yaitu $(0,0668) > 0,05$ yang berarti H_0 diterima. Hasil tersebut menunjukkan hipotesis jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah tidak terbukti. Hasil yang sejalan juga dilakukan oleh Rahmadeni (2019) yang menunjukkan hasil bahwa variabel tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan sehingga menyatakan bahwa adanya peningkatan jumlah tenaga kerja maka dapat berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan di Provinsi Bali sendiri masih terdapat ketimpangan yang cukup tinggi antar wilayah, terutama pada wilayah perkotaan atau pusat ekonomi Bali yaitu di Kota Denpasar, yang mana lokasi ini mencatatkan rasio gini yang tertinggi diantara kabupaten/kota di Provinsi Bali. Namun tidak hanya di wilayah perkotaan saja, nyatanya Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten dengan tingkat ketimpangan tertinggi kedua di Provinsi Bali, yang artinya di Provinsi Bali sendiri masih terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi antar masyarakatnya. Ketimpangan pendapatan yang dialami antar kabupaten juga pasti akan terjadi yang mana upah minimum antar kabupaten juga memiliki ketimpangan, sehingga pendapatan yang dihasilkan akan mengalami perbedaan yang cukup signifikan antara wilayah pusat ekonomi Bali dengan kabupaten yang lainnya. Selain masih tingginya ketimpangan yang ada di Provinsi Bali, masyarakat di Provinsi Bali juga cukup banyak yang cenderung memiliki pekerjaan informal. Masyarakat yang memiliki pekerjaan di sektor informal tentu tidak selalu menghasilkan pendapatan yang mencukupi, terutama setelah adanya pandemi covid-19 yang mana di Provinsi Bali mengalami dampak yang sangat signifikan, sehingga para masyarakat yang bekerja di sektor informal akan mengalami dampak yang cukup mendalam karena terjadinya ketidakstabilan pekerjaan dalam situasi pandemi. Masyarakat di Provinsi Bali cukup banyak yang memiliki pekerjaan di sektor informal, salah satu yang terbesar yaitu pada sektor pertanian dan juga pariwisata, berkurangnya pendapatan akibat tidak adanya pengunjung domestik ataupun internasional yang berkunjung memberikan dampak yang cukup buruk dalam perputaran ekonomi di Provinsi Bali sendiri, pada saat pandemi covid-19, di Provinsi Bali bukan hanya pekerja informal saja yang terkena dampaknya, namun pekerja formal cukup banyak juga yang terdampak, sehingga adanya covid-19 sendiri memberikan dampak yang cukup buruk bagi Provinsi Bali.

Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta PDRB terhadap tingkat kemiskinan bernilai negatif sebesar $-8,44E-05$ dan mendapatkan nilai signifikansi yaitu $(0,0054) < 0,05$ yang berarti H_1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah terbukti. Hasil tersebut sejalan dengan teori *trickle-down effect* yang dikembangkan oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968) yang menyatakan bahwa adanya kemajuan yang diperoleh sekelompok individu mampu menetes sendiri ke bawah dan dapat menciptakan adanya lapangan kerja dan banyaknya

peluang ekonomi dan mampu menumbuhkan berbagai kondisi demi menciptakan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi secara merata sehingga tidak dipungkiri mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giovanni (2018) yang menunjukkan hasil PDRB memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY. Ketika pertumbuhan angka PDRB mengalami peningkatan, maka membuat perusahaan menambah produksi barang dan jasa, dengan adanya peningkatan produksi maka akan mempengaruhi juga terhadap peningkatan upah yang di terima oleh tenaga kerja, sehingga dengan pendapatan masyarakat yang meningkat maka dapat mempengaruhi taraf hidup mereka menjadi meningkat dan mampu terbebas dari jeratan kemiskinan dan mendapatkan taraf hidup yang layak. Tingginya tingkat PDRB yang dihasilkan suatu daerah juga dapat menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang mampu mengkonsumsi barang dan jasa yang ada, yang mana secara tidak langsung semakin tinggi belanja masyarakat menandakan bahwa semakin menurun tingkat kemiskinan yang ada di daerah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan, kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Bali; tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali; jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali; tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui PDRB sebagai variabel yang memediasi atau intervening.

Berdasarkan dari hasil analisis maupun kesimpulan yang dimuat sebelumnya, kemudian dapat diajukan saran-saran yang dibutuhkan dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu pemerintah Provinsi Bali bersama pihak-pihak terkait perlu berfokus terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkualitas mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga memungkinkan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan; perlu adanya campur tangan pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan yang ada di Provinsi Bali, karena dalam hal ini dengan semakin tingginya jumlah masyarakat yang bekerja dapat mempengaruhi pertumbuhan PDRB suatu wilayah sehingga mampu mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa masih terdapat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi di masyarakat, sehingga pemerintah terkait perlu membuat kebijakan-kebijakan dalam penurunan angka ketimpangan yang ada, karena jumlah tenaga kerja yang tinggi tidak serta merta dalam penurunan angka kemiskinan karena masih terdapat adanya ketimpangan pendapatan yang ada dalam masyarakat; selain itu Pemerintah Provinsi Bali maupun pihak-pihak terkait dapat mengeluarkan berbagai program perlindungan sosial, baik edukasi mengenai perlindungan sosial bagi masyarakat maupun dengan adanya bantuan bagi para masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial, apalagi di Provinsi Bali sangat banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal dan belum mendapatkan perlindungan sosial pada pekerjaannya, karena apabila seorang tenaga kerja mengalami resiko dalam pekerjaannya sehingga tidak mampu bekerja lagi, maka keluarga yang ditanggungnya akan mengalami kesulitan dan tidak dapat dipungkiri akan kembali terjebak dalam

kondisi ekonomi yang buruk dan akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kemiskinan.

REFERENSI

- Anonym. (2022). *Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022*. Badan Pusat Statistik. Provinsi Bali. Denpasar.
- (2022). *PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 2018-2022*. Badan Pusat Statistik. Provinsi Bali. Denpasar.
- Doshi, Kokila P. (2000), *Inequality and Economic Growth*, University of San Diego.
- Giovanni, R. (2018). Analisis pengaruh PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016. *Economics Development analysis journal*, 7(1), 23-31.
- Grossman GM, dan Helpman E. 1991. *Innovation and Growth in the Global Economy*. MIT Press, Cambridge.
- Hardinandar, F. (2019). *Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua)*.
- Handrian, O. S., & Indrajaya, I. G. B. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tenaga Kerja, Tingkat Pertumbuhan Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(3), 887-99.
- Lleras, C. (2005). Path analysis. *Encyclopedia of social measurement*, 3(1), 25-30.
- Lucas RE. 1988. *On the mechanics of economic development*. *Journal of Monetary Economics*. 22(1): 3– 42.
- Maisaroh, M., & Risyanto, H. (2018). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Provinsi Banten. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 206-221.
- Nugroho, S. B. M. (2016). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 29(2).
- Okun, A.M., 1962. Potential GNP: *Its Measurement and Significance*, *Proceedings of the Business and Economic Statistics*, 98-103.
- Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, 2003, Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan. *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 51, No. 3, Hal. 191 – 324.
- Rahmadeni, R. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tenaga Kerja dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. *Jurnal Sains Matematika dan Statistika*, 5(1).
- Ranis, G dan Fei, JG. (1968). *Assistance and Economic Development: Comment*. *American Economic Review*, LVIII (4).
- Romer PM. 1986. *Increasing returns and long-run growth*. *Journal of Political Economy*. 94: 1002–37.
- Sianturi, Sahat M T., 2011. *Analisis adeterminan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera*. Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Siregar, H. 2006. Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja. *Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan*. INDEF. Jakarta.
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers. Jakarta
- Todaro, M.P. (2003). *Economic Development*. Seventh Edition. New York: Addition Wesley Longman, Inc.

Tulus Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
Wisnawa, I., & Widanta, A. A. B. P. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Kemiskinan di Wilayah Bali Timur. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas
Udayana*, 10(12), 4829-4862.